

p-ISSN 2087 - 1511

e-ISSN 2614 - 2511



Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik

VOLUME 10, NO. 2, TAHUN 2019



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS GARUT**

DAFTAR ISI

Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Garut

Aceng Ulumudin, Nurbudiwati Nurbudiwati, Mila Karmila, Resin Rela Amrilah

1-8



DOI : <https://doi.org/10.36624/jpkp.v11i2.93>

Citations ?

Abstract views: 24 ; PDF downloads: 33

Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Kabupaten Garut No 50 Tahun 2016 Tentang Tupoksi Dinas Sosial Dalam Pembinaan Sosial (Pembinaan Anak Jalanan) di Kabupaten Garut

Riksa Raesalat, Farida Aliyati

9-14



DOI : <https://doi.org/10.36624/jpkp.v11i2.94>

Citations ?

Abstract views: 28 ; PDF downloads: 16

Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Garut

Ieke Sartika Iriany, Iis Zilfah Adnan, Yowan Rachmawati

15-20



DOI : <https://doi.org/10.36624/jpkp.v11i2.95>

Citations ?

Abstract views: 22 ; PDF downloads: 17

EDITORIAL TEAM

Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Cabang Tarogong Kidul Kabupaten Garut



Rostiena Pasciana, Sartibi Bin Hasyim, Suci Puji Lestari Saripin

11-18

 PDF

 DOI : <https://doi.org/10.36624/jpkp.v10i1.31>

 Citations 0

 Abstract views: 183 ;  PDF downloads: 145

Proses Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Sukanegla Kecamatan Garut Kota

Pupung Pundenswari, Ieke Sartika Iriany, Vallysa Vitta Viona

19-24

 PDF

 DOI : <https://doi.org/10.36624/jpkp.v10i1.32>

 Citations 0


 Abstract views: 118 ;  PDF downloads: 292

Analisis Efektivitas Pelayanan E-Ktp di Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut

Yudi Triana Wahyudi, Aceng Ulumudin, Nurul Aida

25-34

 PDF

 DOI : <https://doi.org/10.36624/jpkp.v10i1.33>

 Citations 0

 Abstract views: 402 ;  PDF downloads: 613

The Correlation Between Students' Habit In Writing Diary And Students Ability In Writing Recount Text

Mutiana Nurmalasari Budiman

35-42

 PDF

 DOI : <https://doi.org/10.36624/jpkp.v10i1.34>

 Citations 0

 Abstract views: 130 ;  PDF downloads: 178

Kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut



Aceng Ulumudin, Nurbudiwati Nurbudiwati, Lismanah Lismanah

1-10

 PDF

 DOI : <https://doi.org/10.36624/jpkp.v10i1.30>

 Citations 0

 Abstract views: 219 ;  PDF downloads: 290



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KABUPATEN GARUT

Ieke Sartika Iriany²; Iis Zilfah Adnan ²; Yowan Rachmawati³

¹ Administrasi Negara, FISIP Universitas Garut
Ieke_sartika@fisip.uniga.ac.id

² Administrasi Negara, FISIP Universitas Garut
Iis.adnan@fisip.uniga.ac.id

² Administrasi Negara, FISIP Universitas Garut
yowanrachmawati5@gmail.com

Abstrak

Latar belakang penelitian ini adalah adanya kebijakan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi yang menimbulkan sisi negatif dan sisi positifnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan implementasi kebijakan sistem zonasi dana apa saja dampak positif dan negative pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kabupaten Garut khususnya di sekolah SMPN 1 Garut sebagai sekolah yang favorit dan SMPN 1 Tarogong Kidul sebagai sekolah non unggulan. Pendekatan yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif data didapatkan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menyebutkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan sekolah belum maksimal, dampak positif dengan adanya kebijakan sistem zonasi adalah lebih hemat dalam pengeluaran ongkos dan jam belajar siswa lebih efektif karena jarak yang lebih dekat. Sedangkan dampak negatifnya adalah membatasi hak siswa dalam memilih sekolah, penyebaran sekolah yang belum merata di seluruh daerah sehingga stigma sekolah favorit susah untuk dihilangkan, adanya kasus siswa yang sering kabur sesuai jam istirahat, hal ini dikarenakan jarak sekolah yang dekat dengan sehingga mempermudah siswa untuk melakukan hal tersebut, dan belum adanya kesadaran dari orangtua mengenai pentingnya memahami dan menerima kebijakan tentang sistem zonasi yang bertujuan untuk menghilangkan diskriminasi pendidikan dan untuk menyamaratakan pendidikan diseluruh daerah di Kabupaten Garut.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Sistem Zonasi, PPDB

1 Pendahuluan

Pembelajaran pada hakikatnya ialah hak untuk tiap masyarakat negeri Indonesia, pembelajaran memegang peranan berarti dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta kemajuan suatu bangsa (Pangaribuan & Hariyati, 2019). Pembelajaran di Indonesia ialah sesuatu sistem pendidikan nasional yang diatur secara sistematis serta terencana. Sistem pendidikan nasional wajib menjamin pemerataan pembelajaran. Tetapi dalam realitasnya, di Indonesia masih hadapi kasus dalam pemerataan pembelajaran. Salah satunya mengenai sistem penerimaan peserta didik baru. Upaya pemerintah dalam pemerataan pembelajaran salah satunya merupakan menghasilkan

kebijakan baru dalam penerimaan peserta didik baru lewat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang di dalamnya mengendalikan menimpa sistem zonasi (Wulandari & Desi, 2018). Adanya sistem zonasi ini diharapkan mampu menciptakan pemerataan, siswa berprestasi tidak berkumpul di sekolah favorit saja karena mau tidak mau mereka harus mendaftar di sekolah terdekat dan tidak bisa mendaftar ke sekolah yang jaraknya jauh walaupun menyandang status favorit (Abidin & Asrori, 2018). Pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan secara tepat sasaran dan berdaya guna akan mampu memecahkan suatu permasalahan secara baik (A. Ramdhani & Ramdhani, 2017).

Kebijakan sering dikenal dengan istilah *policy* dalam bahasa Inggris yang mengandung arti mengurus masalah atau kepentingan umum atau berarti juga administrasi pemerintah (Hasbullah, 2015). Selama ini sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada setiap jenjang SD, SMP, SMA dan SMK di Indonesia menggunakan Nilai Sekolah atau Nilai Ujian Nasional sebagai kriteria utama dalam tahap seleksinya. Pada proses 3 penyeleksian berdasarkan Nilai Ujian Nasional ini, calon peserta didik yang memiliki nilai tinggi lebih berpeluang untuk diterima dibandingkan dengan calon peserta didik yang memiliki nilai rendah. Sehingga berdampak ada sekolah memiliki banyak siswa dan sekolah yang kekurangan siswa. Hal tersebut menyebabkan munculnya sekolah-sekolah unggulan dan sekolah non-unggulan. Ketidakmerataan ini akan menimbulkan dampak yang tidak baik pada dunia pendidikan nasional (Bintoro & Fenty, 2018). Untuk menyikapi hal tersebut agar tidak terjadi stigma sekolah favorit di masyarakat dan untuk menyamaratakan pendidikan di Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Permendikbud No. 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, SD, SMP, SMA dan SMK yang didalamnya memuat mengenai jalur zonasi.

Dinas Pendidikan Kabupaten Garut mengeluarkan surat keputusan Nomor : 421/824-Disdik Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang PAUD/TK, SD, dan SMP Tahun 2019/2020 untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Dinas Pendidikan Kabupaten Garut memberlakukan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru tahun 2019, baik untuk Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Pertama.

Peneliti akan memfokuskan penelitian ini terhadap sekolah SMP saja dikarenakan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut hanya memiliki kewenangan dan tanggung jawabnya hanya dari jenjang TK,SD, dan SMP. Selain itu pada tingkatan SMP ini masih banyak peserta didik baru yang akan mendaftar lebih memilih sekolah yang favorit dengan kata lain pilih-pilih dibanding pada tingkatan TK dan SD.

Kemudian pada pelaksanaannya, sistem zonasi masih diwarnai dengan sejumlah permasalahan, Berikut adalah permasalahan yang diuraikan:

Tabel 1
Uraian Masalah Sistem Zonasi

No	Uraian Masalah	Informan
1	Prioritas jarak pada sistem zonasi menyebabkan turunya semangat belajar, karena nilai atau prestasi dianggap tidak penting.	Masyarakat / Orang Tua Peserta Didik
2	Dikotomi sekolah unggulan dan nonunggulan masih berkembang di masyarakat.	Masyarakat / Orang Tua Peserta Didik
3	Pergaulan di sekolah terbatas pada orang yang sudah dikenal karena letak rumah dan sekolah yang berdekatan.	

4	Adanya sistem zonasi ini, banyak peserta didik baru yang tidak dapat diterima oleh pihak sekolah karena jaraknya rumahnya melebihi aturan meskipun nilai akademis nya bagus.	Wakasek Kesiswaan SMPN 1 Tarkid
5	Dengan adanya sistem zonasi, peserta didik baru yang jauh dari sekolah (yang dikatakan favorit) merasa dirugikan, karena mereka yang memiliki akademisnya yang bagus tidak bisa masuk ke sekolah yang diinginkannya.	Kepala Sekolah SMPN 1 Garut
6	Penghambat pelaksanaan sistem zonasi ini yaitu berasal dari orangtua peserta didik baru yang masih belum menerima mengenai peraturan sistem zonasi, dan berkemauan tinggi ingin tetap memasukkan anaknya ke sekolah yang diinginkan.	

Sumber: Diolah Peneliti (2019)

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti mengambil beberapa informan dari SMP Negeri di Kota Garut yaitu SMPN 1 Garut sebagai sekolah yang dianggap favorit dan SMPN 1 Tarogong Kidul sekolah yang non-unggulan. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di Kabupaten Garut”**.

2 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menentukan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif (M. A. Ramdhani & Ramdhani, 2016; Sugiyono, 2017). Metode ini digunakan agar peneliti dapat menganalisa secara menyeluruh mengenai bagaimana implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB di Kabupaten Garut. Instrumen dari penelitian ini adalah penulis sendiri selaku peneliti dan sebagai yang melakukan penelitian tersebut dengan melakukan observasi untuk mencari data dan mencari dokumentasi. Sumber data diperoleh dari data primer yang merupakan diperoleh secara langsung dari sumber aslinya atau data objek di lapangan, seperti hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, dan data sekunder yang diperoleh pada penelitian ini adalah data yang didapat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Kab. Garut, SMPN 1 Garut, SMPN 1 Tarogong Kidul dan dokumen lainnya yang mendukung penelitian ini. Teknik pengumpulan data yaitu metode observasi, wawancara, dan metode dokumentasi. Analisis data terdiri dari tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan simpulan dan verifikasi. Untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan uji kredibilitas yang terdiri dari menggunakan bahan referensi dan triangulasi.

3 Hasil dan Implikasi

1) Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi

Pelaksanaan kebijakan sistem zonasi peneliti menggunakan teori (Metter, V., & Horn, 1975; Pasciana et al., 2019) yang terdiri dari standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi pelaksana dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Berikut penjelasannya:

a. Standar dan Tujuan Kebijakan

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas bahwa ternyata masyarakat masih belum bisa menerima dengan adanya kebijakan mengenai sistem zonasi ini karena pada dasarnya keinginan orangtua yang masih tetap ingin menyekolahkan anaknya di sekolah yang dianggapnya favorit. Adanya kebijakan ini pemerintah mengharapkan perubahan yang dapat diterima oleh masyarakat dan berdampak positif. Namun kenyataannya masih ada saja masyarakat yang belum bisa menerima kebijakan yang telah dibuat mengenai Sistem Zonasi Sekolah.

Terlepas dari itu semua sebenarnya pelaksanaan kebijakan tersebut sudah berjalan dengan baik meskipun dampak yang terlihat belum signifikan karena baru dilaksanakan selama 1 tahun dan permasalahannya berasal dari masyarakatnya itu sendiri dan bukan dari pihak pembuat kebijakan.

b. Sumber Daya

Sudah memadainya sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan kebijakan sistem zonasi. Dalam penugasan ditempatkan seseorang yang disesuaikan dengan keahlian dan bidangnya. Dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Garut ialah adanya Kelembagaan dan Kesiswaan SMP yang memahami mengenai Sistem Zonasi khususnya tingkat SMP, kemudian di pihak sekolah baik SMPN 1 Garut maupun SMPN 1 Tarogong Kidul dibentuk Panitia Pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang memahami juga mengenai Sistem Zonasi.

c. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Garut maupun dari SMPN 1 Garut dan SMPN 1 Tarogong Kidul bahwasanya mereka sudah bertanggung jawab penuh melakukan tugasnya terhadap peraturan kebijakan mengenai sistem zonasi ini, karena mereka juga ingin memberikan kontribusi yang baik bagi pemerintah dalam mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan khususnya di Kabupaten Garut.

d. Sikap Para Pelaksana

Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, SMPN 1 Garut, dan SMPN 1 Tarogong Kidul semuanya sudah paham dan menerima dengan dikeluarkannya kebijakan ini, dan mendukung secara penuh kebijakan yang dibuat agar mempermudah pemerintah daerah dan sekolah untuk mempercepat pemerataan mutu pendidikan di seluruh daerah Kabupaten Garut dan supaya tidak terjadi lagi stigma sekolah favorit yang berkembang di masyarakat. Namun hal ini tidak sesuai dengan pendapat dari masyarakat/Orangtua yang masih belum bisa menerima secara penuh terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan mereka tidak mendapatkan haknya dalam memilih sekolah untuk anaknya sesuai dengan keinginannya sendiri, hal ini membuat para calon peserta didik baru harus memilih sekolah sesuai zona yang telah dibuat dalam peraturan.

e. Komunikasi Antar Organisasi Pelaksana

Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak sekolah terhadap masyarakat masih belum dikatakan baik. Secara umum, terkait pelaksanaan sistem zonasi pada PPDB dalam hal persiapan dan pelaksanaan sudah sesuai dengan aturan. Komunikasi yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Garut dan sekolah yaitu SMPN 1 Garut dan SMPN 1 Tarogong Kidul dalam menyampaikan informasi mengenai sistem zonasi ini belum dilakukan secara maksimal kepada masyarakat sehingga masyarakat juga belum bisa menerima secara penuh terhadap kebijakan sistem zonasi ini.

f. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Pengaruh dari lingkungan sosial, ekonomi dan politik memiliki pengaruh yang positif dan negatif meskipun belum lama dalam pelaksanaannya, positifnya adalah jarak rumah siswa ke sekolah menjadi dekat yang kemudian hal ini akan mengurangi pengeluaran yang dikeluarkan

oleh orangtua tersebut, kemudian ada beberapa siswa yang diuntungkan dengan adanya sistem zonasi ini karena bisa diterima di sekolah yang dulunya susah untuk masuk sekarang bisa masuk. Kemudian untuk negatifnya adalah masih ada orangtua yang tetap ingin menyekolahkan anaknya ke sekolah yang dianggapnya favorit. Karena ternyata stigma sekolah favorit sampai saat ini masih berkembang di masyarakat dan susah untuk dihilangkan.

2) Dampak Positif dan Negatif dari Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi

a. Dampak Positif

Dampak positif yang didapatkan dengan adanya system zonasi ini yaitu pengeluaran yang lebih sedikit karena tidak perlu mengeluarkan untuk biaya transportasi karena jarak sekolah dan rumah yang berdekatan. Selain itu jalur yang ditempuh lebih dekat dan membuat jam belajar lebih efektif. Dampak lain yaitu memungkinkan sekolah yang ada di Kabupaten garut untuk mendorong kualitasnya karena tidak ada lagi label sekolah favorit dan unggulan.

b. Dampak Negatif

Dengan adanya kebijakan ini terkesan membatasi hak siswa dalam memilih sekolah, mengingat bahwa belum adanya penyebaran sekolah yang belum merata di seluruh daerah sehingga stigma sekolah favorit susah untuk dihilangkan maka dari itu masih banyak siswa yang tidak bisa diterima di sekolah yang mereka inginkan dan harapkan dan terpaksa harus masuk ke sekolah yang sesuai zona nya masing-masing. Kemudian dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti adalah adanya kasus siswa yang sering kabur seusaai jam istirahat, hal ini dikarenakan jarak yang dekat antara rumah dan sekolah sehingga mempermudah siswa untuk melakukan hal tersebut.

4 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Tujuan Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Garut sudah berjalan dengan baik meskipun dampak yang terlihat belum signifikan karena baru dilaksanakan selama 1 tahun dan permasalahannya berasal dari masyarakatnya itu sendiri yang belum bisa menerima kebijakan yang telah dibuat.
- 2) Sumber daya yang tersedia dalam melaksanakan kebijakan sistem zonasi ini sudah memadai dan berjalan sesuai dengan kebutuhannya.
- 3) Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Garut maupun dari SMPN 1 Garut dan SMPN 1 Tarogong Kidul bahwasanya mereka sudah bertanggung jawab penuh melakukan tugasnya terhadap peraturan kebijakan mengenai sistem zonasi ini, karena mereka juga ingin memberikan kontribusi yang baik bagi pemerintah dalam mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan khususnya di Kabupaten Garut.
- 4) Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, SMPN 1 Garut, dan SMPN 1 Tarogong Kidul semuanya sudah paham dan menerima dengan dikeluarkannya kebijakan ini, dan mendukung secara penuh kebijakan yang dibuat agar mempermudah pemerintah daerah dan sekolah untuk mempercepat pemerataan mutu pendidikan di seluruh daerah Kabupaten Garut. Sedangkan dari pihak masyarakat/Orangtua yang masih belum bisa menerima secara penuh terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan mereka tidak mendapatkan hak nya dalam memilih sekolah untuk anaknya sesuai dengan keinginan nya sendiri, hal ini membuat para calon peserta didik baru harus memilih sekolah sesuai zona yang telah dibuat dalam peraturan.
- 5) Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Garut dan sekolah yaitu SMPN 1 Garut dan SMPN 1 Tarogong Kidul dalam

menyampaikan informasi mengenai sistem zonasi ini belum dilakukan secara maksimal sehingga masyarakat juga belum bisa menerima secara penuh terhadap kebijakan sistem zonasi ini.

- 6) Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik dalam sistem zonasi menimbulkan pengaruh positif yakni menghemat pengeluaran dan negatifnya masih berkembangnya stigma sekolah favorit di masyarakat.
- 7) Dampak Positif dan Negatif dari kebijakan yaitu dampak positif nya adalah menghemat biaya pengeluaran, dan jarak tempuh yang sangat dekat. Sedangkan dampak negatifnya adalah membatasi hak siswa dalam memilih sekolah yang diinginkannya.

5 Rekomendasi

- 1) Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Garut diharapkan untuk terlebih dahulu melakukan penyebaran sekolah yang merata disetiap daerah di Kabupaten Garut agar stigma sekolah favorit dapat dihilangkan.
- 2) Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, SMPN 1 Garut, dan SMPN 1 Tarogong Kidul perlu melakukan sosialisasi lebih maksimal dan dilakukan secara langsung kepada calon peserta didik dan orangtua siswa terkait kebijakan sistem zonasi.
- 3) Pihak masyarakat diharapkan dapat memahami dan menerima dengan dikeluarkannya kebijakan sistem zonasi ini agar mempermudah pemerintah daerah dan sekolah untuk mempercepat pemerataan pendidikan di Kabupaten Garut.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya untuk seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu menyelesaikan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Abidin, M. Z., & Asrori. (2018). Peranan Sekolah Kawasan Berbasis Sistem Zonasi dalam Pembentukan Karakter di SMP Negeri 15 Kedung Cowek Surabaya. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1).
- Bintoro, & Fenty, R. (2018). Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Zonasi Sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMA Tahun Ajaran 2017/2018 di Kota Samarinda. *Jurnal Riset Pembangunan*, 1(1).
- Hasbullah. (2015). *Kebijakan Pendidikan (Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia)*. Rajawali Pers.
- Kuriawan, W. A., Alamanda, D. T., Ramdhani, A., & Akbar, G. G. (2019). *Modul Praktika Komputer II*. Universitas Garut.
- Metter, V., & Horn, V. (1975). The Policy Implementation Process : A Conceptual Framework. *Departement of Political Science Ohio State University Administration and Society*, 6(4).
- Pangaribuan, E. N., & Hariyati, N. (2019). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMP di Kabupaten Gresik. *Inspirasi Manajemen Pendidikan*,

7(1).

Pasciana, R., Pundenswari, P., & Sadrina, G. (2019). Relokasi Pedagang Kaki Lima (Pkl) Untuk Memperindah Kota Garut. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 5(3), 288–303. <https://doi.org/10.26618/kjap.v5i3.2649>

Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>

Ramdhani, M. A., & Ramdhani, A. (2016). *Penelitian Pemasaran* (1st ed.). Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung.

Ramdhani, A., Kuriawan, W. A., Alamanda, D. T., & Akbar, G. G. (2018). *Modul Praktika Komputer I*. Universitas Garut.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Wulandari, & Desi. (2018). Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 5(9).